

Nama	: Fuji Nurfirdaus	Hari/Tanggal	: Selasa, 16 Mei 2023
Npm	: 202143500345	Jenis Ujian	: UTS
Kelas	: S4D		
Matkul	: Sejarah Pendidikan dan PGRI		
Dosen	: Damas. H. S.Pd.,M.M.		
Jurusan	: Teknik Informatika		

1. Pada zaman Hindia Belanda, terdapat perbedaan dalam pendidikan antara Sekolah Pemerintah Kolonial dan Sekolah Swasta yang diadakan oleh masyarakat pribumi. Perbedaannya adalah:
 - a. Akses: Sekolah Pemerintah Kolonial lebih mudah diakses oleh anak-anak pribumi dari keluarga kaya atau terkait dengan pemerintah kolonial. Sekolah Swasta yang diadakan oleh masyarakat pribumi sulit diakses karena kurangnya dana dan dukungan pemerintah.
 - b. Kurikulum: Sekolah Pemerintah Kolonial menggunakan kurikulum modern yang lebih menekankan pendidikan barat, sedangkan Sekolah Swasta yang diadakan oleh masyarakat pribumi masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal.
 - c. Kualitas Pendidikan: Pendidikan di Sekolah Pemerintah Kolonial lebih baik karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya, guru yang terlatih, dan fasilitas yang lebih baik. Sekolah Swasta yang diadakan oleh masyarakat pribumi sering kali terbatas dalam hal dana, fasilitas, dan kualifikasi guru.
 - d. Kesenjangan Sosial: Kebijakan ini menciptakan kesenjangan sosial antara anak-anak pribumi yang bersekolah di Sekolah Pemerintah Kolonial dan Sekolah Swasta. Anak-anak pribumi di Sekolah Pemerintah Kolonial memiliki lebih banyak peluang pendidikan dan pekerjaan yang baik. Sementara anak-anak pribumi di Sekolah Swasta terbatas dalam peluang pendidikan dan mobilitas sosial mereka.

Dengan perbedaan ini, anak-anak pribumi di Sekolah Swasta mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang baik dan peluang masa depan yang lebih baik. Ini memperkuat pengaruh pemerintah kolonial dan mencerminkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan pada waktu itu.

2. Pada Kongres III PGRI di Madiun pada tahun 1948, PGRI sebagai organisasi perjuangan guru menetapkan haluan dan sifat perjuangan yang jelas. Berikut adalah beberapa haluan dan sifat perjuangan tersebut, serta bagaimana perjuangan dilakukan:
 - a. Nasionalisme: PGRI sangat mencintai tanah air dan berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Mereka berfokus pada kepentingan bangsa dan negara.
 - b. Patriotisme: PGRI memiliki rasa cinta dan kesetiaan kepada tanah air. Mereka berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
 - c. Demokrasi: PGRI mempercayai prinsip demokrasi dalam perjuangannya. Mereka ingin membangun sistem pendidikan yang adil, melibatkan semua pihak, dan melayani semua siswa.

- d. Perjuangan Sosial: PGRI berjuang untuk keadilan sosial, kesetaraan dalam pendidikan, dan kesejahteraan para guru.
- e. Solidaritas: PGRI bekerja sama dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam pendidikan maupun perjuangan nasional.

Dalam melaksanakan perjuangannya, PGRI menggunakan beberapa sifat dan strategi, seperti:

- a. Organisasi Massa: PGRI membangun organisasi dengan anggota yang terorganisir dan memiliki kesadaran bersama dalam perjuangan mereka.
- b. Aksi dan Kampanye: PGRI melakukan tindakan dan kampanye untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan, kesejahteraan guru, dan isu-isu penting dalam dunia pendidikan.
- c. Pendidikan dan Penyadaran: PGRI memberikan pendidikan dan informasi kepada anggotanya dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, peran guru, dan isu-isu pendidikan yang relevan.
- d. Kerja Sama dan Jaringan: PGRI bekerja sama dengan organisasi lain dan membangun jaringan untuk memperkuat perjuangan bersama, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- e. Dialog dan Negosiasi: PGRI berusaha untuk berbicara dan bernegosiasi dengan pemerintah dan pihak terkait agar dapat mencapai solusi yang adil dan bermanfaat bagi pendidikan dan guru.

Dengan haluan dan sifat perjuangan yang jelas serta strategi yang dilakukan, PGRI berusaha untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, dan berkontribusi pada pembangunan pendidikan serta kemajuan bangsa Indonesia.

3. Pada Kongres VII PGRI yang diselenggarakan di Semarang pada tahun 1954, terdapat beberapa hasil yang dicapai. Berikut adalah penjelasan hasilnya:
 1. Deklarasi Satu Hati: Kongres VII PGRI menghasilkan Deklarasi Satu Hati, yang menyatakan kesatuan perjuangan PGRI dalam memperjuangkan pendidikan nasional yang merata dan berkualitas. Deklarasi ini menjadi semangat dan landasan bagi perjuangan PGRI ke depan.
 2. Penegasan Peran Guru: Kongres ini menekankan pentingnya peran guru dalam memajukan pendidikan dan bangsa Indonesia. Guru diakui sebagai garda terdepan dalam mengajar dan membimbing generasi muda.
 3. Pembaruan Kurikulum: Kongres VII PGRI mendukung pembaruan kurikulum yang mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat relevan, memperkuat budaya Indonesia, dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi siswa.
 4. Peningkatan Kesejahteraan Guru: Kongres ini menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru. PGRI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak guru, termasuk gaji yang layak, tunjangan, dan jaminan sosial.

5. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Masyarakat: PGRI menyadari pentingnya kerja sama antara guru, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan. Kongres ini mendorong kolaborasi yang erat untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pendidikan.
4. Dalam melestarikan jiwa, semangat, dan nilai '45 (merujuk pada semangat perjuangan dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945), terdapat sejumlah tantangan dalam bidang edukasi dan keteladanan di era reformasi yang penuh dengan keterbukaan dan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Berikut adalah penjelasan dalam bahasa yang sederhana:
1. Menciptakan Kesadaran: Tantangan pertama adalah menciptakan kesadaran di kalangan generasi muda tentang pentingnya memahami dan menghargai jiwa, semangat, dan nilai '45. Dalam era yang penuh dengan informasi dan pengaruh global, menjaga kesadaran terhadap nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan menjadi kunci dalam melestarikannya.
 2. Menyesuaikan dengan Perubahan: Era reformasi yang penuh dengan keterbukaan dan kebebasan berarti adanya perubahan sosial dan nilai-nilai yang beragam. Tantangan kedua adalah bagaimana menyesuaikan nilai-nilai '45 dengan tuntutan dan perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan esensi dan inti dari nilai-nilai tersebut.
 3. Menghadapi Tantangan Global: Di era globalisasi, adanya pengaruh budaya dan nilai-nilai asing dapat menjadi tantangan dalam melestarikan jiwa, semangat, dan nilai '45. Penting untuk mempromosikan identitas budaya Indonesia dan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga warisan sejarah dan nilai-nilai nasional.
 4. Mengintegrasikan dalam Sistem Pendidikan: Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengintegrasikan jiwa, semangat, dan nilai '45 ke dalam sistem pendidikan. Kurikulum dan metode pembelajaran harus memasukkan nilai-nilai tersebut secara konkret dan relevan, agar generasi muda dapat memahaminya dengan baik.
 5. Membangun Keteladanan: Keteladanan menjadi aspek penting dalam melestarikan jiwa, semangat, dan nilai '45. Pemimpin, guru, dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, agar generasi muda terinspirasi dan mempraktikkannya.
5. Pada zaman G30S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) memiliki beberapa tugas dan peran dalam situasi tersebut. Berikut adalah beberapa tugas KAGI pada zaman G30S/PKI:
1. Mendorong Kesadaran Nasionalisme: KAGI bertugas untuk membangkitkan dan memperkuat kesadaran nasionalisme di kalangan guru dan siswa. Mereka mengedepankan semangat cinta tanah air dan mengajarkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda.

2. Melakukan Pendidikan Politik: KAGI memiliki tugas untuk menyampaikan pendidikan politik kepada anggota dan siswa. Mereka berperan dalam memberikan pemahaman tentang ideologi nasional, Pancasila, dan peran guru dalam masyarakat.
3. Mengawasi dan Membantu Program Pemerintah: KAGI bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan program-program pendidikan. Mereka berperan dalam mengawasi dan membantu implementasi kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Menggalang Solidaritas: KAGI bertugas untuk membangun solidaritas antara guru dan mendukung kerjasama antar-guru dalam memajukan pendidikan. Mereka berperan dalam membangun kebersamaan dan saling membantu di antara anggota KAGI.
5. Menjaga Netralitas Pendidikan: KAGI memiliki tugas untuk menjaga netralitas pendidikan dan menghindari pengaruh politik yang merugikan. Mereka berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang obyektif dan menghindari indoktrinasi politik yang mempengaruhi siswa.
6. Menghadapi Tantangan Keamanan: Pada masa G30S/PKI, KAGI juga memiliki tugas untuk menghadapi tantangan keamanan yang timbul. Mereka harus berupaya menjaga keamanan dan keselamatan guru serta siswa di tengah situasi yang tidak stabil.